

PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Jakarta, 1 Nopember 2017

BIDANG : EKSEKUTIF**LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : GENUK ENDANG SUMIWI, S.I.P., M.Si.
2. Jabatan : KEPALA SEKSI - EVALUASI DAN PEMBINAAN
PENDAPATAN - DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN ASET DAERAH
3. NHK : 217982
4. Tanggal Pelaporan : 29 Oktober 2014, 31 Juli 2015

Status Laporan**II. DATA HARTA****A. HARTA TIDAK BERGERAK
(TANAH DAN BANGUNAN)**

1. Tanah & Bangunan seluas 110 m2 & 90 m2, di Kota SEMARANG, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2003

B. HARTA BERGERAK**a. ALAT TRANSPORTASI
DAN MESIN LAINNYA**

1. Mobil, merk TOYOTA AVANZA VELOZ, tahun pembuatan 2013, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2013
2. Motor, merk SUZUKI, tahun pembuatan 2004, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2004

		Status Laporan	
		29 Oktober 2014	31 Juli 2015
	Rp.	112.620.000	Rp. 112.620.000
1.	Rp.	112.620.000	Rp. 112.620.000
	Rp.	194.000.000	Rp. 194.000.000
1.	Rp.	185.000.000	Rp. 185.000.000
2.	Rp.	3.000.000	Rp. 3.000.000

	29 Oktober 2014	31 Juli 2015
3. Motor, merk HONDA, tahun pembuatan 2009, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2009	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA	----	----
c. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp. 31.750.000	Rp. 31.750.000
1. BENDA BERGERAK LAINNYA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2003 sampai dengan 2014	Rp. 31.750.000	Rp. 31.750.000
C. SURAT BERTAHAP	Rp. 0	Rp. 0
D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA	Rp. 10.353.473	Rp. 10.353.473
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI	Rp. 10.353.473	Rp. 10.353.473
E. PIUTANG	Rp. 0	Rp. 0
TOTAL HARTA (II)	Rp. 348.723.473	Rp. 348.723.473
III. HUTANG	Rp. 137.782.100	Rp. 124.892.500
1. Hutang dalam bentuk PINJAMAN UANG	Rp. 80.896.500	Rp. 80.896.500
2. Hutang dalam bentuk PINJAMAN BARANG (Perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 56.885.600	Rp. 43.996.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III)	Rp. 210.941.373	Rp. 223.830.973

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis

